



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2020

Halaman: 9

Lima Orang Saksi Ikuti Sidang

YOGYA, TRIBUN - Mantan jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta, Rabu (15/1). Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan lima saksi orang saksi dari unsur Pemerintah Kota (Pem-

kal) Yogya dan Kejari Yogyakarta. Lima orang saksi yang dihadirkan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Agus Tri Haryono; Sekretaris DPUPKP, Wijayanto; Kabid Binamarga DPUPKP, Umi Akhsanti; Kas Intel Kejari Yogyakarta, Suwono; dan Staf Intel

Kejari Yogyakarta, Fajar Pamungkas.

Saksi yang pertama didengar keterangannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Agus Tri Haryono.

• ke halaman 15

Lima Orang Saksi Ikuti Sidang

• Sambungan Hal 9

Sementara keempat saksi lainnya diminta untuk meninggalkan ruang sidang. Hal itu dilakukan agar saksi lain memberikan keterangan sepengetahuan masing-masing, dan tidak meniru saksi sebelumnya.

Dalam kesaksiannya, Agus Tri Haryono diinterogasi berbagai pertanyaan oleh JPU KPK. Mulai tugas dan fungsinya sebagai kepala dinas DPUPKP, proses lelang, termasuk proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Supomo Cs.

Dalam kesaksiannya, Agus mengatakan telah bersurat ke Kejari Yogyakarta untuk melakukan pengawasan pada beberapa proyek pembangunan DPUPKP. Dimana salah satu jaksa yang menjadi anggota TP4D adalah Eka Safitra. Saat proses lelang, Eka Safitra memberikan ma-

sukan terkait syarat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Namun yang menjadi perdebatan adalah minimal penyedia jasa, (peserta lelang) di Yogyakarta yang memiliki SMK3 tersebut.

Agus menilai selama proses lelang Eka Safitra lebih dominan dan ingin semua perkembangan disampaikan kepadanya. Tak hanya itu, ia juga menerima keluhan dari beberapa kepala bidang DPUPKP, dan akhirnya membicarakannya kepada Kepala Kejari Yogyakarta. "Saya dapat laporan dari bidang Sumber daya air, Binamarga, dan Bangunan Gedung, kalau Eka Safitra meminta dokumen, katanya untuk direvisi. Eka lebih dominan selama proses lelang. Saya dapat laporan juga kalau pak Eka minta DP," ujarnya.

Ia pun tak tahu bahwa PT Widoro Kandang hanya bendera yang digunakan oleh Gabriella Yuan Anna. Ia sendiri pun tahu hal tersebut se-

telah terjadi OTT KPK.

Selain menanyakan soal kasus Supomo Cs, JPU KPK juga menanyakan aliran dana lain dari DPUPKP. Agus mengakui DPUPKP menerima ucapan terimakasih dari beberapa penyedia jasa, yang dikelola oleh Sekretaris DPUPKP, Wijayanto. Namun uang tidak boleh lebih dari Rp1 juta.

JPU KPK RI juga menanyakan aliran dana ke Wali Kota Yogyakarta. Namun Agus menyatakan tidak ada. Saat ditanya terkait perintah memenangkan proyek, Agus mengaku pernah dipanggil oleh orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut. Agus juga menyebut beberapa nama yang menurutnya saran dari Wali Kota Yogyakarta.

Ketua Tim JPU KPK, Wawan Yunarwanto mengungkapkan pertanyaan yang disampaikan masih berkaitan dengan proyek yang ada di DPUPKP. Apalagi sebelumnya terdakwa Gabriella me-

nyebutkan ada permintaan uang terimakasih untuk operasional.

"Tadi memang sempat ada protes karena pertanyaan di luar terdakwa (Eka Safitra). Bukan enggak ada sama sekali, masih ada kaitannya dengan proyek DPUPKP. Tadi akhirnya juga benar disampaikan bahwa ada uang terimakasih, untuk permintaan dari rekanan lain, ada Kejaksaan, Polisi, DPRD," ungkapnya.

Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti membantah jika disebut meminta untuk memenangkan salah satu penyedia jasa. "Tidak ada, bukan begitu. Kalau memenangkan kesannya tendensius sekali. Saya memberikan arahan agar dicari kontraktor yang berkualitas, kaitannya dengan harga.

Jangan terjebak yang ndelosor (harga rendah). Nanti kalau dlosoran, kualitas jelek, kan repot, juga perlu diperhatikan waktunya," kata Haryadi. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005